



Dewan Minta Bantuan RTS di Badung Tak Subjektif

Mangupura (Bali Post) -

Kecilnya angka pengentasan kemiskinan di Kabupaten Badung, menjadi sorotan DPRD setempat. Sebab, dari 13.294 Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang ada selama lima tahun terakhir, baru 4.726 yang terentaskan. Padahal, pendapatan Badung telah mencapai Rp 2,8 triliun. Untuk itu, Dewan meminta pemerintah dalam memberi bantuan tidak salah sasaran dan tidak bersifat subjektif. Bantuan tersebut harus benar-benar mengena pada sasaran, sehingga upaya mewujudkan masyarakat Badung yang sejahtera tercapai.

"Kami berharap ke depan agar bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) lebih difokuskan kepada RTS, sehingga RTS dapat tergarap secara maksimal," ujar Wakil Ketua DPRD Badung Ketut Suiasa dalam sidang Paripurna DPRD Badung, Senin (30/3) kemarin.

Pemerintah daerah, diharapkan Ketut Suiasa, secara rutin melakukan validasi data kemiskinan sebagai acuan dalam melakukan intervensi pengentasan kemiskinan. Juga, melakukan koordinasi dan sinergitas antar-SKPD dalam program pengentasan kemiskinan yang terintegrasi. "Karena, kemiskinan dapat terjadi di berbagai aspek," sebutnya.

Dikatakannya, Badung telah memiliki Perda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) dan peraturan pelaksanaannya. "Kami harapkan segera dibuatkan forum TJSP untuk lebih memudahkan koordinasi dan pengarahannya pelaksanaan kegiatan tersebut," katanya.

Dewan juga berharap bantuan TJSP diutamakan pada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. "Implementasi dari kebijakan itu sebaiknya difokuskan pada kebutuhan masyarakat dalam hal ekono-

mi, sosial dan lingkungan berbasis produktivitas, bukan bersifat konsumtif," ucapnya.

Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung Ida Bagus Oka Dirga mengaku telah berupaya maksimal mengentaskan kemiskinan di wilayahnya. Upaya tersebut diwujudkan dengan memberikan bantuan UEP untuk mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). "Hanya, pengentasan kemiskinan tidak berada pada kami saja, namun masing-masing SKPD," tegasnya.

Terkait sorotan dewan agar program pengentasan kemiskinan tepat sasaran dan tidak subjektif, Oka Dirga menyatakan telah menyalurkan bantuan UEP sesuai profesi masyarakat miskin yang menjadi sasaran. "Kami memberikan bantuan bibit sapi, babi dan lainnya sudah sesuai dengan profesi penerima, jadi sudah tepat sasaran," katanya. (kmb27)



Terkait Temuan BPK

Jaksa Gagal Cari Data di Pemkot Denpasar

Denpasar (Bali Post) -

Petugas Intel Kejari Denpasar, Senin (30/3) kemarin bertandang ke Pemkot Denpasar. Petugas berencana mencari data terkait temuan BPK yang mensinyalir dugaan korupsi di sejumlah SKPD di Kota Denpasar. Namun, jaksa gagal membawa data karena pejabat yang hendak ditemui tidak ada

di tempat. "Kami sedang lakukan puldata (pengumpulan data-red)," tandas Kasiintel Syahrir Sagir. Dia sempat ke kantor Pemkot, namun sebaliknya tidak membawa hasil.

Komang Lestari Kusuma, Kasubag Bantuan Hukum Pemkot Denpasar, tidak membantah kedatangan petugas Intel Kejari Denpasar itu. Katanya,

kejaksaan datang ingin bertemu Kabag Hukum untuk koordinasi masalah data terkait temuan BPK. "Tadi sih maunya ke Kabag Keuangan untuk nyari data. Tadi saya sudah kontak ke Kabag Keuangan. Namun, kabag tidak ada di kantornya karena ada acara," katanya, sehingga dia meminta jaksa untuk nanti koordinasi lagi.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Denpasar Emanuel Zebua mengatakan, pihaknya saat ini sedang melakukan puldata. Soal harus izin Sekda Kota Denpasar, Kajari mengatakan itu merupakan proses. Soal penyitaan dokumen, pihaknya belum mendapatkan laporan dari Kasi Intel Kejari Denpasar. (kmb37)

Edisi : Selasa, 31 Maret 2015

Hal : 2



✓ Apresiasi Capaian Pembangunan di Badung Dewan Rekomendasikan LKPJ Bupati Badung TA 2014

DPRD Kabupaten Badung memberikan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung Tahun Anggaran (TA) 2014 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati Badung tahun 2010-2015. Rekomendasi ini dituangkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Badung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekomendasi atas LKPJ Bupati Badung Tahun 2014 dan Keputusan DPRD Badung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Rekomendasi atas LKPJ AMJ Bupati Badung Tahun 2010-2015. Hal tersebut terungkap saat Rapat Paripurna Istimewa DPRD Badung, Senin (30/3) kemarin, di Ruang Utama Gosana, Gedung DPRD Badung, Puspem Badung.

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Badung I Nyoman Giri Prasta serta dihadiri Bupati Badung A.A. Gde Agung, Wabup I Made Sudiana, wakil ketua dan anggota DPRD Badung, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Badung dan pimpinan SKPD Badung. Dalam rekomendasi DPRD Badung yang disampaikan Wakil Ketua DPRD Badung I Ketut Suiasa tersebut, berisi sejumlah catatan strategis berupa saran,

masukannya terhadap arah kebijakan umum pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan daerah. Termasuk pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas perbantuan dan penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan Kabupaten Badung. Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan penandatanganan berita acara serah terima rekomendasi Dewan oleh Pimpinan DPRD Badung dan Bupati Badung.

Bupati Badung A.A. Gde Agung dalam sambutannya menyampaikan, catatan-catatan kritis dan strategis Dewan yang dituangkan dalam rekomendasi tersebut mencerminkan betapa mendalam dan komprehensifnya pemerma-

taran dan penilaian Dewan terhadap upaya serta kinerja Bupati beserta jajarannya dalam mengemban amanat masyarakat dalam kurun waktu tahun 2010-2015. Dalam catatan tersebut, Bupati dapat menyimak bahwa terdapat capaian kemajuan ekonomi yang mendapat apresiasi Dewan.

Terhadap capaian-capaian tersebut, Bupati menyatakan capaian tersebut tidak diraih dengan mudah. Namun, merupakan hasil kerja keras, komunikasi, sinergi dan konektivitas yang solid antara pemerintah dan DPRD serta dukungan seluruh komponen di Kabupaten Badung. "Capaian tersebut ibarat hasil harmonisasi sebuah orkestra yang masing-masing orang di dalamnya melaksanakan fungsi dan perannya masing-masing, namun tetap menghasilkan komposisi simponi yang harmonis," jelasnya.

Bupati menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan buah dari kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Badung mulai dari bupati, para kepala SKPD, camat, perbekel/lurah hingga jajaran terdepan yaitu kepala lingkungan dan kelian banjar. Juga dukungan seluruh

jajaran pimpinan daerah Badung yang berhasil mewujudkan tatanan kehidupan yang aman, kondusif, tertib, berlandaskan pada hukum dan partisipasi pemangku kepentingan dari berbagai sektor.

Bupati mencontohkan, capaian di sektor budaya tidak dapat dilepaskan dari peranan dan kontribusi pihak sekaa teruna, penggerak PKK, karang taruna, sekaa kesenian, sekaa subak, para pemangku dan sulinggih, termasuk tokoh-tokoh umat beragama di Badung. Sementara capaian di sektor ekonomi, juga hasil dari para pengerajin, pedagang dan pengusaha mulai dari skala kecil, menengah maupun besar. (ad12)



ISTIMEWA - Rapat Paripurna Istimewa DPRD Badung, Senin (30/3) kemarin di Ruang Utama Gosana.



Dipertanyakan, Bantuan Sapi Dialihkan untuk Simpan-Pinjam

Negara (Bali Post) -

Sapi bantuan dari pemerintah pusat yang dialihkan oleh Desa Delod Berawah untuk simpan-pinjam di BUMDes dipertanyakan warga. Pasalnya, bantuan sapi tahun 1996 yang selama beberapa tahun bergulir ke masyarakat itu kini sudah tidak ada aset dalam bentuk sapi, melainkan uang. Dari informasi, sapi-sapi itu telah diuangkan dan dihibahkan ke BUMDes menjadi simpan-pinjam.

Sejumlah warga ditemui Senin kemarin mengungkapkan pengalihan itu dilakukan saat awal perbekel menjabat sekitar tahun 2008 lalu. Ada kebijakan kepada warga yang menerima guliran bantuan sapi untuk mengembalikan dalam bentuk uang Rp 1,5 juta per ekor. Sehingga masing-masing penerima bantuan sapi itu harus mengembalikan Rp 3 juta, sebab, satu induk sapi harus mengembalikan dua anak sapi.

SP, salah seorang warga mengatakan setahu mereka bantuan itu semestinya bergulir. Ketika bantuan turun, awalnya hanya sejumlah warga yang kurang mampu yang menerima bantuan. Syaratnya, setiap warga yang menerima satu induk sapi, harus mengembalikan dua anak sapi dan disalurkan ke keluarga kurang mampu lainnya. Tujuannya untuk mengentaskan kemiskinan.

Namun, setelah berjalan beberapa tahun dan sapi

berkembang hingga 40 ekor lebih, muncul kebijakan lain dengan mengganti uang. Apalagi uang pengganti yang telah dimasukkan ke BUMDes itu tidak jelas. Sementara itu Kepala Desa Delod Berawah Made Rentana dikonfirmasi Senin (30/3) kemarin mengakui pihaknya mengeluarkan kebijakan mengganti uang untuk pengembalian sapi-sapi tersebut.

Bantuan yang menurutnya berupa hibah sapi itu dialihkan menjadi simpan pinjam di BUMDes dan perbaikan kantor desa. Bantuan sapi itu merupakan Proyek Pembangunan Wilayah Terpadu (PPWT) tahun 1996 atas Instruksi Presiden (Inpres) dan diberikan di sejumlah desa. Sapi-sapi itu juga telah beranak dan berkembang hingga puluhan ekor. Pada tahun 2008 saat dirinya menjabat perbekel, sapi itu diganti dengan uang.

"Oleh penerima tidak me-

nyerahkan anak sapi, tapi berupa uang. Jumlahnya sekitar Rp 40 juta," tandas Rentana. Pertimbangannya karena saat itu warga kesulitan mencari pakan dan harga sapi anjlok di pasaran. Berdasarkan kesepakatan desa, Babinsa, Babinkamtibmas, LPM, BPD dan tim penyelamat aset, akhirnya bantuan itu dialihkan untuk simpan pinjam BUMDes dan Rp 16 juta di antaranya untuk pembangunan kantor desa.

Desa juga masih menyimpan data terkait aset sapi itu, siapa saja penerima dan jumlah anak. Dari awalnya 10 sapi, sudah berkembang hingga beberapa anak sapi. Di antaranya juga sudah lunas dengan mengembalikan dua ekor anak sapi. Saat ini, simpan pinjam masih berjalan dengan bunga kecil sesuai aturan di BUMDes. "Yang jelas aset ini kan untuk kepentingan desa, bukan untuk kepentingan pribadi," terangnya. (kmb26)

Edisi : Selasa, 31 Maret 2015

Hal : 14



Implementasi UU Nomor 23 Tahun 2014

Pusat Ambil Alih Terminal Mengwi

Mangupura (Bali Post) -

Pemerintah pusat akan mengambil alih Terminal Mengwi dari Pemkab Badung. Kebijakan ini merupakan implementasi dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Bupati Badung A.A. Gde Agung yang ditemui usai sidang paripurna DPRD Badung, Senin (30/3) kemarin, membenarkan kebijakan tersebut. "Iya, sesuai Undang-undang No. 23 Tahun 2014, terminal tipe A akan dikelola oleh pemerintah pusat," ungkapnya.

Bupati Badung juga menegaskan, selama ini pengelolaan Terminal Mengwi tidak hanya dilakukan oleh Badung, tetapi juga pemerintah provinsi. Sebab, terminal di Desa Mengwitani itu adalah terminal dengan status tipe A. "Selama ini, Terminal Mengwi kompetensinya tidak hanya Badung, tetapi juga provinsi. Karena itu kan Terminal Tipe A," jelas Bupati Gde Agung.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Badung I Wayan Weda Dharmaja menyebutkan, wacana penarikan Terminal Mengwi oleh pemerintah pusat sudah dibahas dalam rapat yang dipimpin Sekda Ba-

dung Kompyang R. Swandika, belum lama ini. Rapat khusus tersebut membahas implementasi UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, di mana salah satunya menyebutkan terminal tipe A akan dikelola pemerintah pusat. "Kami di Badung sudah rapat dengan Pak Sekda untuk membahas masalah ini (UU 23/2014 - red)," ucapnya.

Selain membahas pengalihan Terminal Mengwi, dalam rapat tersebut juga dibahas masalah aset Badung yang ada di Terminal Mengwi yang menyangkut masalah P3D (personal, peralatan, pembiayaan dan dokumen). "Saat ini kami sedang mendata aset-aset

Badung yang ada di Terminal Mengwi," ujarnya.

Disebutkannya, rencananya hasil pendataan aset ini akan diserahkan ke pusat pada April mendatang. Mengenai status aset-aset Badung, pihaknya masih menunggu petunjuk pusat. "Yang jelas, April kami serahkan datanya. Bagaimana keputusannya, tunggu nanti saja. Ini bunyi undang-undang. Hanya, PP (peraturan pemerintah-nya) belum ada," tandasnya. (kmb27)



Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Hubungi telepon 0361-7400391.

Edisi : Basa, 31 Maret 2015

Hal : 2



Pembetonan Dua Ruas Jalan Telan Dana Rp 4,7 Miliar

Singaraja (Bali Post) –

Ruas Jalan Udayana – Jalan Kartini, Singaraja belakangan kondisinya tanahnya tergolong labil. Kendaraan yang melintas di jalan ini pun cukup padat dengan tonase kendaraan yang berat.

Tak pelak jalan ini menjadi bergelombang dan bahkan banyak yang berlubang. Mengatasi kondisi ini, Pemkab Buleleng melakukan perbaikan di ruas jalan ini melalui anggaran APBD induk tahun 2015. Perbaikan jalan ini dilakukan menggunakan beton dan menelan anggaran Rp 4,7 miliar.

Informasi yang dikumpulkan di lapangan, proyek betonisasi Jalan Udayana – Jalan Kartini, Singaraja ini Senin (30/3) kemarin, mulai dikerjakan. Sebuah alat berat tampak mengeruk aspal di Jalan Jalan Udayana Singaraja sebelah barat.

Proyek betonisasi ini dikerjakan oleh rekanan PT Aditya Sinar Pratama dengan nilai kontrak Rp 4,7 miliar dari total pagu awal Rp 5,7 miliar. Jalan sepanjang 1,2 kilometer ini berakhir masa pengerjaannya 9 Juli 2015 mendatang. Sejak proyek ini dimulai, personel Dinas Perhubungan (Dishub) Buleleng diugaskan mengatur arus kendaraan agar tidak menimbulkan kemacetan.

Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas PU Buleleng, I Made Suwitra, menjelaskan, perbaikan jalan ini dilakukan den-

gan pengerasan menggunakan sistem betonisasi. Pola perbaikan, ini untuk memberikan kenyamanan yang maksimal kepada pengguna jalan di Jalan Udayana – Jalan Kartini. Apalagi, struktur tanah di ruas jalan ini tergolong labil. "Tanahnya labil sehingga pola pengerasan dengan betonisasi ini untuk memberikan kenyamanan pengguna jalan yang tergolong ramai dan menjadi jalur lintasan truk bertonase berat," katanya.

Menurut Suwitra, sesuai bestek proyek, ruas Jalan Udayana – Jalan Kartini akan menggunakan tiga lapis beton dengan ketebalan 45 centimeter. Fondasi menggunakan agregat batu pecah setebal 20 centimeter. Lapisan kedua beton nonstruktur setebal 5 centimeter dan beton lapisan atas setebal 20 centimeter. Dengan perbaikan ini, umur kedua ruas jalan ini diperkirakan tahan sampai selama 20 tahun ke depan. "Tentu harus diimbangi dengan perawatan, sehingga jalan ini bisa tahan lebih lama," imbuhnya.

Di sisi lain, Suwitra mengatakan, proyek betonisasi jalan penghubung Desa Tambakan dan Desa Pakisan Kecamatan Kubutambahan untuk sementara ditunda. Hal ini karena ada perbaikan jalan yang lebih mendesak. Meski demikian, perbaikannya tetap akan dilakukan dalam tahun anggaran berikutnya. (kmb38)

Edisi : Selasa, 31 Maret 2015

Hal : 12



Jaksa Tak Berdaya

Kasus Art Center Eksekusi Terpidana Gagal

Denpasar (Bali Post) -

Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar dan jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali sepertinya tak berdaya dalam kasus Art Center. Walau putusannya sudah *inkraht* pekan lalu, eksekusi terhadap kedua terpidana kasus Art Center, Ketut Suastika dan Ketut Mantara Gandhi, Senin (30/3) kemarin gagal dilakukan. JPU Made Tangkas mengatakan, eksekusi batal dilaksanakan karena ada permintaan dari kuasa hukum terpidana.

Suastika minta penundaan eksekusi karena ada acara agama. Sedangkan Mantara Gandhi ada upacara pengabenan. Surat penundaan eksekusi itu dibawa langsung tim kuasa hukum terpidana, Ketut Ngastawa dan Haposan Sihombing. Pagi kemarin, tim kuasa hukum terpidana ke Kejari Denpasar untuk bertemu Kasipidsus Wayan Sutarjana. Namun, tim akhirnya diterima JPU Made Tangkas. "Klien kami sudah dipanggil untuk rencana eksekusi hari ini, tanggal 30. Namun karena ada alasan kemanusiaan, bahwa Suastika ada upacara di kampungnya," tandas Ngastawa.

Ngastawa menambahkan, Suastika menjadi *pangarep* yang di kampungnya tidak ada siapa-siapa. Suastika menjadi penanggung jawab terhadap

upacara *puinama kadasa*. Tim kuasa hukum terpidana kemudian bertemu dengan JPU Tangkas, minta izin selama seminggu untuk tidak dilakukan eksekusi. "Dan itu diizinkan untuk seminggu," tandas Ngastawa.

Sementara Mantara Gandhi minta izin tidak dieksekusi dengan alasan kemarin ada upacara pengabenan kakak iparnya. Ngastawa mengatakan, selama ini kliennya cukup kooperatif. "Sehingga, kali ini minta dengan hormat mohon diizinkan. JPU sudah koordinasi dan diizinkan. Kami tidak ada alasan menunda, namun karena alasan kemanusiaan saja," tandas Ngastawa sembari menyebutkan, kedua terpidana siap dieksekusi 6 April mendatang.

Sementara Haposan Sihombing mengatakan, surat

permohonan sudah dilayangkan dan JPU Tangkas mengizinkan setelah berkoordinasi dengan Kasipidsus Kejari Denpasar. "Saya siap menghadirkan (terpidana - red) Senin depan, jam sembilan pagi," kata Hasoloan.

Sementara itu, Tangkas mengatakan JPU berpendapat bahwa itu perkembangan kemanusiaan. "Satu ngaben, satunya ada upacara," tandas Tangkas. Oleh karenanya, dia akan melakukan eksekusi 6 April tanpa harus melalui surat panggilan lagi. Dia mengatakan, nanti kedua terpidana akan dijebloskan ke dalam Lapas Kerobokan.

Adanya kesan istimewa dalam kasus Art Center ini, dibantah oleh Made Tangkas. Dia mengaku tidak enak menjemput terpidana dalam keadaan terpaksa, karena



Sambungan -

Suastika ada upacara di *sang-gah gede*-nya. "Dia sebagai *pangemong*," katanya sembari mengatakan, Suastika sudah minta izin.

Bagaimana dengan terpidana lain jika melakukan hal yang sama, sedangkan masyarakat mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum? Apakah boleh juga masyarakat atau terpidana korupsi melakukan penundaan eksekusi? Terhadap hal ini, Tangkas mengatakan, sepanjang ada pemberitahuan secara wajar, ya... pihak kejaksaan akan menerima. "Jika tidak ada pemberitahuan, itu mangkir namanya," tandas Tangkas.

Apakah itu berlaku untuk semua terpidana? Tangkas mengatakan, sepanjang permohonannya jelas, kooperatif, semua terpidana bisa mengajukan penundaan eksekusi. Itu akan diterima jaksa. "Jika ada permohonan, walaupun tidak ada kematian, kita terima. Apalagi, kuasa hukum ada jaminan karena dia yang mengajukan permohonan," tandas Made Tangkas dari Kejati Bali. (kmb37)

Edisi : Selasa, 31 Maret 2015

Hal : 3



Perusda Ingin Jadikan Art Center Destinasi Pariwisata

Denpasar (Bali Post) -

Perusahaan Daerah (Perusda) Bali belakangan membantah bila ingin mengelola atau mengomersialisasikan Art Center. Mengingat, niat awal Perusda sejatinya mengoptimalkan sisa-sisa waktu dan ruang yang selama ini tidak dimanfaatkan dan tidak teroptimalkan. Direktur Utama Perusda Bali I Nyoman Baskara menegaskan hanya ingin menjadikan Art Center sebagai paket wisata yang wajib dikunjungi.

Pihaknya mengklaim upaya ini dilakukan untuk meningkatkan apresiasi dan mengapresiasi seniman di Pulau Dewata. "Karya mereka (seniman - red) jika mampu kita transformasikan bisa membangun dunia dan bisa membangun peradaban. Itu dari konsep apresiasi. Kalau mengapresiasi, wajib bagi pemerintah dan swasta menciptakan sebuah terobosan atau inovasi yang memungkinkan para pelaku pariwisata dan pengunjung mengapresiasi karya mereka," ujar Baskara didampingi Direktur Teknis Akuisisi Perusda Bali I Wayan Tana, Senin (30/3) kemarin.

Tidak hanya seniman, keikutsertaan Perusda Bali dalam manajemen Art Center nantinya juga menguntungkan para *guide*, *undagi*, desain grafis, fotografer, bahkan tukang kebun. Pasalnya, Perusda akan melakukan penataan Art Center agar layak dikunjungi wisatawan. Mulai dari menata taman agar lebih rindang, menerapkan *e-ticketing*, melakukan *screening* kepada pengunjung, hingga memasang *sign board* yang informatif. Termasuk, menyediakan *guide in house* yang bisa memberikan informasi akurat tentang seni dan budaya Bali, fotografer bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan Art Center untuk keperluan foto seperti *pra-wedding* dan lainnya, berikut dengan tukang *make up* khusus yang menunjang kegiatan itu.

"Jadi, *guide* luar itu ndak boleh bicara di sana. Yang akan bicara itu *guide*-nya kita, yang tahu persis budaya Bali itu apa. Begitu juga fotografer dan tukang *make up*, harus pakai dari kita," imbuh Tana. Terkait *e-ticketing* dan *screening* bagi pengunjung, menurutnya, itu bagian dari pengelolaan Art Center yang profesional. *E-ticketing* berfungsi untuk menertibkan sehingga orang tidak bisa bebas berkeliaran di sana. Sementara *screening*, dilakukan untuk mengetahui apakah orang yang masuk ke Art Center bermaksud baik atau tidak. "Itu tidak akan membatasi, bagi masyarakat Bali sampai level bawah pun bisa masuk ke sana, karena tiketnya dapat dijangkau. Misalnya ada segerombolan anak SD segala macam itu, kita kasih kebijaksanaanlah. Perusda tidak akan mengekang orang bisa masuk ke sana, tidak sama sekali. Bahkan, kita akan menjadikan Art Center jadi lebih baik yang akan mereka tonton kembali," jelas Tana.

Menurutnya, tidak logis ketika di era sekarang ada pihak yang mengkhawatirkan sesuatu yang memiliki efek bisnis. Terlebih yang akan dibisniskan oleh Perusda adalah hasil karya terbaik yang wajib ditonton semua orang. Justru kalau yang terbaik dihargakan murah, itu bukanlah suatu bentuk apresiasi. Oleh karena itu, seniman yang berkiprah di Art Center nantinya akan diberikan *fee*, bukan harga sewa. Namun, setelah sebelumnya diseleksi secara ketat dan dipilih yang terbaik oleh kurator yang ditunjuk Perusda. (kmb42)

Edisi : Selasa, 31 Maret 2015

Hal : 2